BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang implementasi Pasal 24 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah di Desa Berangas Timur, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Pasal 24 Ayat (1) Perda Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2018 di Desa Berangas Timur belum berjalan secara optimal. Pemerintah desa belum menyediakan Tempat Penampungan Sementara (TPS) sebagaimana diamanatkan dalam perda tersebut. Akibatnya, masyarakat tidak memiliki akses terhadap fasilitas pembuangan sampah yang layak dan terorganisir, sehingga membuang sampah ke sungai atau membakar sampah menjadi praktik umum yang merugikan lingkungan. Kesenjangan antara kebijakan dan pelaksanaan di lapangan menjadi bukti lemahnya perwujudan kebijakan publik di tingkat desa.
2. Faktor-faktor yang menghambat implementasi kebijakan ini terdiri atas hambatan internal dan eksternal. Hambatan internal meliputi keterbatasan anggaran desa, ketiadaan lahan untuk TPS, serta rendahnya kesadaran masyarakat. Sementara hambatan eksternal mencakup minimnya dukungan dari Dinas Lingkungan Hidup, tidak adanya sanksi yang diterapkan terhadap pelanggaran perda, dan kurangnya sosialisasi serta koordinasi antarlembaga. Di sisi lain, terdapat potensi dukungan berupa keinginan masyarakat untuk

ikut serta dalam pengelolaan sampah, asalkan diberikan fasilitas dan edukasi yang memadai.

B. Saran

Sebagai upaya untuk memperbaiki dan mengoptimalkan pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2018, maka penulis menyampaikan saran-saran berikut:

1. Untuk Pemerintah Desa Berangas Timur:

Pemerintah desa perlu menyusun program pengelolaan sampah yang terencana dan terukur, dimulai dengan pengadaan TPS melalui pengalokasian anggaran desa dan musyawarah pembangunan desa. Pemerintah desa juga perlu membangun komunikasi yang lebih kuat dengan pihak kabupaten guna memperoleh bantuan teknis dan dana serta melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan.

2. Untuk Pemerintah Kabupaten Barito Kuala:

Dinas Lingkungan Hidup perlu lebih aktif memberikan pendampingan dan supervisi terhadap desa-desa yang belum memiliki sistem pengelolaan sampah yang layak. Selain itu, pemerintah daerah juga perlu menyiapkan skema pembiayaan yang mendukung pembangunan TPS di desa-desa serta melakukan penegakan hukum atas pelanggaran perda guna menciptakan efek jera.

3. Untuk Masyarakat Desa Berangas Timur:

Masyarakat diharapkan meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan dengan ikut serta dalam program gotong royong, memilah sampah, dan mendukung inisiatif pembangunan TPS. Kesadaran kolektif

untuk menjaga lingkungan akan menjadi fondasi utama dalam mewujudkan desa yang bersih dan sehat.

4. Untuk Peneliti Selanjutnya:

Penelitian ini hanya mencakup satu desa dalam wilayah hukum Kabupaten Barito Kuala dan terbatas pada dua fokus rumusan masalah. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan kajian di desa-desa lain dalam wilayah hukum kabupaten yang sama guna memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh terhadap implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2018. Pendekatan kualitatif juga dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menekankan analisis terhadap struktur kelembagaan, pola hubungan antara pemerintah desa dan pemerintah daerah, serta dinamika sosial yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum daerah, sehingga menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih kontekstual dan aplikatif dalam kerangka hukum tata negara.